



NEWSLETTER PUSDATIN

Daftar Isi

- Pemerintah Percepat Integrasi Neraca Komoditas untuk Impor Pangan Strategis, Halaman 1
- Dinamika Investasi PMDN Sektor Pertanian: Fluktuasi yang Tersentralisasi pada Subsektor Perkebunan, Halaman 4
- Pusdatin Tingkatkan Kualitas Data Pertanaman melalui Pengumpulan Evidence Berbasis Geotagging, Halaman 6
- Perkuat Data Palawija 2026: Kementan–BPS Bahas Pedoman Pengumpulan Statistik Pertanian (SP), Halaman 8
- Bangkit Bersama: Update Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam 2026, Halaman 9
- e-Banper: Bantuan Pertanian Makin Tepat Sasaran, Halaman 11
- Satu Data Pertanian untuk Indonesia Maju, Halaman 11

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



<https://bit.ly/surveipusdatinkementan>

Pemerintah Percepat Integrasi Neraca Komoditas untuk Impor Pangan Strategis

Pemerintah mempercepat integrasi sistem perizinan impor empat komoditas pangan strategis, yakni gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah, ke dalam sistem Neraca Komoditas (NK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola impor pangan nasional sekaligus tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 8 Mei 2026.

Kebijakan tersebut mengatur mekanisme larangan dan pembatasan (lartas) impor untuk sejumlah komoditas strategis guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian pasokan pangan nasional. Pemerintah pun bergerak cepat melakukan sinkronisasi regulasi dan integrasi sistem antar kementerian/ lembaga agar implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas pelaku usaha.



Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sistem NK Komoditas Gandum Pakan, Bungkil Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan dipimpin oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri (05/05/2026)

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Roydatul Zikria, S.Si, MSE
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.kom, MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Sistem NK Komoditas Gandum Pakan, Bungkil Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan dipimpin oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri (05/05/2026)

Koordinasi intensif dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga National Single Window (LNSW). Dalam rapat teknis yang berlangsung pada awal Mei 2026, pemerintah menargetkan sistem NK untuk empat komoditas tersebut dapat beroperasi penuh pada Juli 2026.

Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri, Lorenta P.K. Siahaan, yang memimpin rapat koordinasi pada 5 Mei 2026, menegaskan bahwa proses transisi harus memiliki landasan hukum dan kesiapan teknis yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

“Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2025, perubahan komoditas Neraca Komoditas diatur melalui Kepmenko Bidang Pangan. Apabila Kepmenko belum terbit, maka sebagaimana Permendag, perizinan impor dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian. Kami menargetkan kesiapan sistem pada Juli 2026 karena ini merupakan penambahan komoditas, bukan pembangunan sistem baru,” ujar Lorenta.

Ia juga mengingatkan agar implementasi kebijakan tetap memperhatikan kondisi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya importir kacang-kacangan. Menurutnya, persyaratan administratif yang terlalu kompleks berpotensi menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan impor.

“Kami meminta adanya pertimbangan ulang terhadap elemen data surat jaminan supply dari negara asal untuk komoditas kacang tanah dan kacang hijau karena sebagian besar pelakunya merupakan UMKM dan proses verifikasi tidak mudah,” tambahnya.

Integrasi sistem ini menjadi bagian penting dari transformasi tata niaga pangan nasional yang selama ini dinilai masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data, perizinan, dan pengawasan volume impor. Dengan sistem NK, pemerintah berharap seluruh proses dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terukur.

Di sisi teknis, kesiapan sistem untuk komoditas kacang tanah dan kacang hijau dinilai lebih matang dibandingkan gandum pakan dan bungkil kedelai. Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Andri Gilang Nugraha Ansari, menjelaskan bahwa selama masa transisi akan berlaku dua mekanisme impor, yaitu melalui Neraca Komoditas apabila Kepmenko telah diterbitkan, atau menggunakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian sebelum NK diberlakukan sepenuhnya.

“Permendag Nomor 11 Tahun 2026 mengatur dua opsi impor, yaitu melalui Neraca Komoditas jika sudah ada Kepmenko, atau rekomendasi Kementerian Pertanian selama NK belum berlaku. Kami juga tetap membutuhkan output cetakan dokumen untuk komoditas yang belum ditetapkan NK namun sudah menggunakan sistem inhouse SINAS NK agar tidak terjadi kendala dalam penerbitan Persetujuan Impor,” jelas Andri.

Sementara itu, LNSW menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan integrasi sistem melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan penyederhanaan proses layanan digital.

Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Purnomo, melalui nota dinas menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan teknis terkait integrasi sistem SIMREK PKH dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

“LNSW berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima secara terintegrasi dalam rangka pembahasan teknis integrasi sistem SIMREK PKH dengan SINSW,” ujar Purnomo.

Komoditas gandum pakan dan bungkil kedelai menjadi perhatian khusus karena proses

integrasinya dinilai lebih kompleks. Sistem aplikasi SIMREK PKH milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) harus disesuaikan dengan sistem SINSW agar proses perizinan berjalan lancar.

Direktur Pakan (Ditjen PKH), Tri Melasari, menilai percepatan integrasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat regulasi baru sudah mulai berlaku efektif.

“Mengingat pemberlakuan Permendag mulai tanggal 8 Mei 2026, diperlukan langkah-langkah percepatan agar implementasi pelayanan permohonan perizinan impor kedua komoditas lartas tersebut berjalan dengan baik melalui penyesuaian sistem aplikasi SIMREK PKH dengan sistem LNSW,” tegas Tri.

Pihak Ditjen PKH juga mengungkapkan bahwa mereka tengah merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 agar dapat mengakomodasi ketentuan baru terkait gandum pakan dan bungkil kedelai.

“Selama sistem NK belum siap, Kementerian Pertanian akan memberikan rekomendasi berupa Surat Pertimbangan Rencana Kebutuhan (SPPRK) dengan elemen data yang lengkap,” ujar perwakilan Ditjen PKH.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyatakan telah melakukan langkah cepat untuk mengakomodasi penerapan NK pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Pertanian dan penyusunan simulasi implementasi bagi pelaku usaha.

“Kami telah menerbitkan Kepmentan untuk mengakomodasi Neraca Komoditas kacang tanah dan kacang hijau. Saat ini kami juga mengusulkan simulasi bertahap bagi pelaku usaha, baik dalam mekanisme rekomendasi maupun NK,” ungkap perwakilan Ditjen Tanaman Pangan.

Penerapan sistem baru ini turut mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas

PK). KPK menilai integrasi sistem perizinan impor dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan tata niaga pangan.

“Kami mendukung target implementasi sistem pada Juli 2026. Yang terpenting adalah simplifikasi proses teknis dan akuntabilitas volume impor. KPK juga siap memfasilitasi koordinasi dengan pelaku usaha melalui coaching clinic agar proses transisi berjalan transparan,” ujar perwakilan KPK.

Dalam rapat koordinasi terakhir pada 7 Mei 2026 secara daring, pemerintah menyepakati bahwa implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap meskipun regulasi telah berlaku efektif sejak 8 Mei. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kesiapan sistem dan meminimalkan gangguan terhadap proses impor.

Perwakilan LNSW menyampaikan bahwa sistem untuk komoditas kacang-kacangan telah relatif siap karena memanfaatkan infrastruktur inhouse SINAS NK. Namun, integrasi untuk gandum dan bungkil kedelai masih membutuhkan penyesuaian lanjutan.

“Sistem untuk kacang hijau dan kacang tanah pada prinsipnya sudah siap. Namun untuk gandum dan bungkil kedelai masih memerlukan penyesuaian teknis. Kami memperkirakan persiapan penuh membutuhkan waktu sekitar dua bulan, tergantung kecepatan koordinasi data dari Kementerian Pertanian,” jelas perwakilan LNSW.

Sebagai solusi sementara, LNSW juga menawarkan mekanisme penarikan data dari aplikasi Simreg ke SINSW atau penggunaan surat rekomendasi sebagai lampiran sistem agar pelayanan impor tetap berjalan.

Pemerintah meminta seluruh pihak menjaga keseragaman informasi selama masa transisi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Sosialisasi dan pendampingan teknis akan terus dilakukan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

Bagi importir, pemerintah mengimbau agar segera menyesuaikan dokumen dan elemen data sesuai ketentuan baru, termasuk penggunaan kode HS spesifik seperti 1001.99.99 untuk gandum pakan dan 2304.00.29 untuk bungkil kedelai.

Melalui integrasi Neraca Komoditas, pemerintah berharap tata kelola impor pangan nasional dapat menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien. Sistem ini juga diharapkan mampu mendukung penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan impor yang lebih terukur dan akuntabel di masa mendatang.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

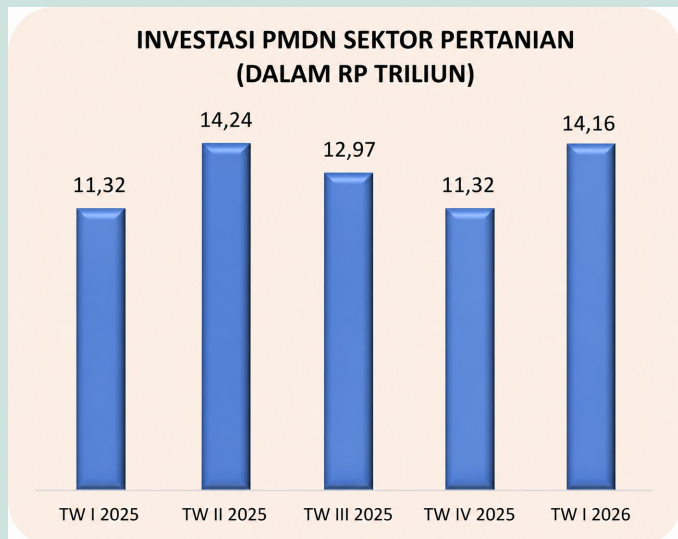
Dinamika Investasi PMDN Sektor Pertanian: Fluktuasi yang Tersentralisasi pada Subsektor Perkebunan

Pada akhir April 2026 BKPM telah merilis capaian realisasi investasi PMDN untuk Triwulan I Tahun 2026. Sektor pertanian menempati urutan ke-7 dengan realisasi investasi 5,69% dari total atau sekitar Rp14,16 triliun. Jika dicermati perkembangan investasi sektor pertanian sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Di satu sisi, nilai investasi mengalami fluktuasi dari triwulan ke triwulan. Namun di sisi lain, terdapat pola yang konsisten sekaligus mengungkap struktur investasi yang sangat terpusat pada subsektor tertentu.

Pada awal periode pengamatan, yakni Triwulan I 2025, investasi sektor pertanian tercatat sebesar Rp11,32 triliun. Angka ini kemudian meningkat tajam pada Triwulan II 2025 menjadi Rp14,24 triliun, atau tumbuh lebih dari 25 persen. Lonjakan ini menandai tingginya aktivitas investasi di awal tahun, yang umumnya dipengaruhi oleh dimulainya proyek baru serta siklus usaha di sektor pertanian.

Namun, tren positif tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun. Memasuki Triwulan III 2025, investasi mulai mengalami koreksi menjadi

Rp12,97 triliun, dan kembali melemah pada Triwulan IV 2025 hingga mencapai Rp11,32 triliun. Penurunan bertahap ini menggambarkan adanya fase penyesuaian, yang kemungkinan terkait dengan faktor musiman, realisasi proyek yang telah selesai pada semester awal, serta dinamika ekonomi yang lebih luas.



Perkembangan Investasi PMDN Sektor Pertanian TW I sd. IV 2025 dan TW I 2026

Menariknya, memasuki tahun berikutnya, sektor pertanian kembali menunjukkan daya pulih yang kuat. Pada Triwulan I 2026, investasi melonjak menjadi Rp14,16 triliun, hampir menyamai puncak investasi pada pertengahan tahun sebelumnya. Secara tahunan, angka ini juga menunjukkan peningkatan signifikan sekitar 25 persen dibandingkan Triwulan I 2025, mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap sektor pertanian.

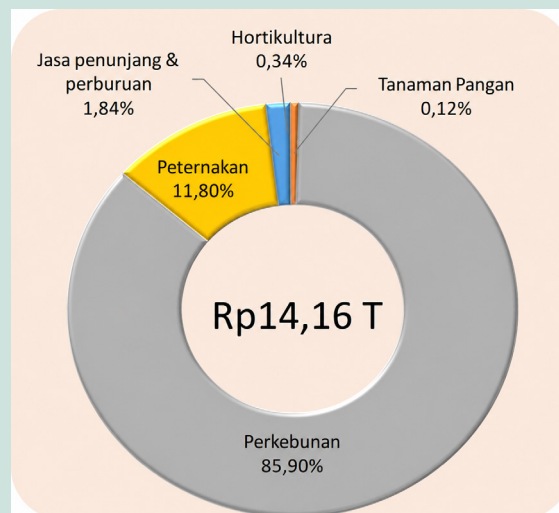
Jika dicermati, pola pergerakan ini menunjukkan kecenderungan adanya faktor musiman. Investasi cenderung meningkat pada awal tahun, kemudian melemah menjelang akhir tahun, sebelum kembali menguat pada awal siklus berikutnya. Pola ini sejalan dengan karakteristik sektor pertanian yang erat kaitannya dengan musim tanam, siklus produksi, dan pola penyerapan anggaran.

Namun demikian, di balik dinamika nilai investasi tersebut, terdapat temuan yang lebih mendasar ketika melihat komposisi investasi berdasarkan subsektor pada Triwulan I 2026. Struktur investasi ternyata sangat terkonsentrasi pada subsektor perkebunan.

Dari total investasi yang ada, subsektor perkebunan mendominasi dengan nilai sebesar Rp12.162,04 miliar atau sekitar 85,90 persen. Dominasi ini menunjukkan bahwa perkebunan masih menjadi magnet utama bagi investor, didukung oleh skala usaha besar, orientasi ekspor, serta potensi keuntungan dari komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di posisi berikutnya terdapat subsektor peternakan yang mencatat investasi sebesar Rp1.670,08 miliar atau 11,80 persen. Meskipun menjadi kontributor terbesar kedua, jarak dengan subsektor perkebunan sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di peternakan masih berkembang, tetapi belum mampu menyaingi daya tarik subsektor perkebunan.

Sementara itu, subsektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil. Sub sektor jasa penunjang dan perburuan mencatat investasi sekitar Rp261,05 miliar atau 1,84 persen, diikuti oleh hortikultura sebesar Rp48,17 miliar (0,34 persen), dan tanaman pangan yang hanya mencapai Rp16,76 miliar atau sekitar 0,12 persen dari total investasi.



Struktur Investasi PMDN Triwulan I 2026 Menurut Subsektor

Rendahnya investasi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi perhatian tersendiri. Padahal, kedua subsektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi di sektor pertanian belum sepenuhnya merata, dan masih cenderung berfokus pada subsektor yang berorientasi ekspor dan berskala besar.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi sektor pertanian menunjukkan dua hal utama. Pertama, adanya fluktuasi jangka pendek yang relatif wajar dan dipengaruhi faktor musiman. Kedua, adanya ketimpangan struktur investasi yang sangat terkonsentrasi pada subsektor perkebunan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga mendorong distribusi yang lebih seimbang antar subsektor. Upaya seperti pemberian insentif, penguatan teknologi, serta pengurangan risiko usaha di subsektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan struktur investasi yang lebih merata, sektor pertanian tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi lebih kuat dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, grafik ini tidak hanya bercerita tentang naik turunnya angka. Ia menggambarkan perjalanan sebuah sektor yang terus beradaptasi, menghadapi tantangan, dan tetap menjanjikan peluang. Di balik fluktuasi yang terjadi, tersimpan optimisme bahwa pertanian masih akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi ke depan. Sektor pertanian masih akan bertransformasi menuju arah yang lebih berkelanjutan.

Penulis : Wieta B. Komalasari

Pusdatin Tingkatkan Kualitas Data Pertanaman melalui Pengumpulan Evidence Berbasis Geotagging

Dalam upaya memperkuat kualitas data statistik pertanian nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor B-1367/TI.010/A/03/2026 tanggal 12 Maret 2026 melakukan penguatan rekonsiliasi data Luas Tambah Tanam (LTT) Padi ePusluh dengan data Luas Panen (LP) dan produksi Kerangka Sampel Area (KSA).

Pemerintah menegaskan pentingnya pengumpulan data pertanaman padi yang akurat dan terintegrasi guna mendukung penyusunan

kebijakan pembangunan pertanian nasional. Penegasan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta para penanggung jawab Program Swasembada Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa rekonsiliasi data dilakukan terhadap data luas tambah tanam padi yang dikumpulkan oleh petugas penyuluh melalui aplikasi ePusluh dengan data luas panen dan produksi KSA-BPS. Untuk mendukung proses validasi tersebut, diperlukan pengumpulan data luas tanam dan luas panen yang dilengkapi dengan foto berkoordinat atau geotagging pada setiap periode pelaporan.

Penggunaan foto berkoordinat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa data pertanaman yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Melalui sistem geotagging, lokasi pertanaman dapat dipantau secara lebih akurat sehingga mempermudah proses verifikasi dan monitoring perkembangan pertanaman padi nasional.

Selain itu, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa data luas tanam dan luas panen padi dapat dilaporkan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian melalui tautan pelaporan yang telah disediakan dan dilakukan setiap minggu terakhir pada bulan berjalan. Langkah ini dilakukan agar proses monitoring pertanaman dapat berlangsung secara real time dan berkelanjutan.

Penguatan rekonsiliasi data LTT Padi ePusluh dengan data LP dan produksi KSA menjadi bagian dari transformasi digital sektor pertanian yang terus dikembangkan pemerintah. Integrasi data berbasis spasial dan digital diharapkan mampu meningkatkan kualitas statistik pertanian sekaligus mendukung pengambilan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta seluruh

pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas data pertanian nasional. Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap data yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi pertanaman sebenarnya.



Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, Lutfhul Hakim

Melalui penguatan sistem pelaporan berbasis geotagging dan rekonsiliasi data secara berkala, pemerintah optimistis kualitas data Luas Tambah Tanam dan Luas Panen Padi nasional akan semakin baik. Dengan dukungan data yang valid dan terintegrasi, program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan apel pagi penyuluh pertanian yang dilaksanakan pada 13 Mei 2026, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, Lutfhul Hakim, menyampaikan pentingnya upaya perbaikan pengumpulan data evidence Luas Tambah Tanam (LT) dan Luas Panen (LP) Padi melalui kegiatan sosialisasi aplikasi pengumpulan data evidence LT dan LP berbasis foto berkoordinat. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengumpulan data statistik pertanian nasional agar lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arahannya, Kapusdatin menegaskan bahwa kualitas data pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Beliau menyampaikan bahwa masih ditemukan sejumlah kendala dalam proses pengumpulan data evidence LT dan LP Padi, seperti ketidaksesuaian titik koordinat, evidence foto yang tidak representatif, hingga lokasi geotagging yang berada di luar area pertanaman maupun di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan ketelitian petugas lapangan dalam melakukan penginputan data pertanaman.

Melalui aplikasi pengumpulan data evidence LT dan LP berbasis foto berkoordinat, pemerintah berupaya memperkuat validasi data pertanaman secara real time. Sistem ini memungkinkan petugas lapangan untuk melakukan pengambilan foto pertanaman dan panen yang langsung terhubung dengan titik koordinat lokasi sehingga mempermudah proses monitoring dan verifikasi data.

Dalam sosialisasi tersebut, Kapusdatin juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan. Penyuluh diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh data yang dikirim telah sesuai dengan kondisi aktual pertanaman dan berada pada lokasi yang benar. Selain itu, penyuluh juga diminta untuk lebih aktif melakukan pengecekan koordinat sebelum data dikirimkan ke sistem pusat.

Beliau menambahkan bahwa penggunaan teknologi geotagging dan integrasi data spasial merupakan bagian dari transformasi digital sektor pertanian yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan dukungan teknologi tersebut, proses monitoring pertanaman dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terukur.

Kegiatan sosialisasi aplikasi pengumpulan data evidence LT dan LP Padi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam pengumpulan data statistik pertanian sekaligus memperkuat kualitas data Luas Tambah Tanam dan Luas Panen Padi nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petugas lapangan, sistem statistik pertanian Indonesia diharapkan

semakin modern, akurat, dan mampu mendukung kebijakan pangan nasional secara berkelanjutan.

Penulis : Suyati

Perkuat Data Palawija 2026: Kementan–BPS Bahas Pedoman Pengumpulan Statistik Pertanian (SP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas statistik pertanian nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik, (Kamis, 30 April 2026 bertempat di Kampus Badan Pusat Statistik) di gelar pembahasan Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian (SP) Palawija Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa data palawija yang dikumpulkan di seluruh wilayah Indonesia semakin akurat, konsisten, dan relevan dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian.

Acara ini dihadiri oleh Sekditjen Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian, Direktorat Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).



Pembahasan Pedoman SP Palawija Sinergi Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik

Mengapa SP Palawija Penting?

Komoditas palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar memiliki peran vital dalam sistem pangan nasional. Selain sebagai sumber pangan alternatif, komoditas ini juga menjadi bahan baku industri

dan pakan. Oleh karena itu, ketersediaan data yang valid mengenai luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi menjadi fondasi utama dalam perencanaan sektor pertanian.

Melalui SP Palawija, pemerintah dapat memantau perkembangan produksi secara rutin, mengidentifikasi potensi wilayah, serta merespons cepat jika terjadi penurunan produksi. Di sinilah pentingnya pedoman yang seragam agar data yang dihasilkan memiliki standar yang sama di seluruh daerah.

Fokus Pembahasan Pedoman Tahun 2026

Pembahasan pedoman tahun ini menitikberatkan pada penyempurnaan konsep, definisi, dan metodologi pengumpulan data. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain: a) Penegasan definisi operasional, seperti luas tanam dan luas panen agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di lapangan; b) Standarisasi metode pencatatan dan pelaporan, sehingga data yang dihimpun lebih konsisten antar wilayah; c) Penguatan alur proses bisnis data, mulai dari pengumpulan hingga publikasi; d) Peningkatan mekanisme validasi dan verifikasi, untuk meminimalkan kesalahan data.

Diskusi yang berlangsung melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah, sehingga pedoman yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan SP Palawija. Kementerian Pertanian berperan dalam pengumpulan data melalui jaringan penyuluh pertanian, sementara BPS bertanggung jawab dalam pengolahan, validasi, dan penyajian data. Sinergi ini memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya cepat tersedia, tetapi juga memiliki kualitas statistik yang tinggi. Dengan koordinasi yang semakin kuat, diharapkan tidak ada lagi perbedaan angka antar instansi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.



Diskusi Pembahasan Pedoman SP Palawija kolaborasi Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik

Transformasi Digital dalam Pengumpulan Data

Salah satu arah pembaruan dalam pedoman 2026 adalah pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan aplikasi berbasis mobile untuk pelaporan data menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Digitalisasi memungkinkan: a) pelaporan data secara real-time; b) pengurangan kesalahan input manual; c) kemudahan monitoring oleh pemerintah pusat; d) transparansi dalam proses pengumpulan data.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Sejumlah tantangan dalam implementasi SP Palawija, antara lain: a) keterbatasan sumber daya manusia di lapangan; b) perbedaan kapasitas antar daerah; c) potensi keterlambatan pelaporan; d) kebutuhan peningkatan pemahaman teknis petugas. Melalui pedoman yang lebih jelas dan terstruktur, diharapkan tantangan tersebut dapat diminimalkan secara bertahap.

Dampak bagi Kebijakan Pertanian

Data SP Palawija yang berkualitas akan memberikan dampak nyata dalam pengambilan kebijakan, di antaranya: a) penentuan target produksi yang lebih realistis; b) penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran; c) pengendalian harga dan pasokan komoditas; d) perencanaan program pengembangan wilayah. Dengan kata lain, data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pembahasan Pedoman Pengumpulan Data SP Palawija Tahun 2026 menjadi bukti komitmen bersama antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik dalam membangun sistem statistik pertanian yang modern dan terpercaya. Di tengah tantangan sektor pangan yang semakin kompleks, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi, standarisasi, dan pemanfaatan teknologi, SP Palawija diharapkan tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merumuskan masa depan pertanian Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.

Penulis : Suyati

Bangkit Bersama: Update Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam 2026

Memasuki Mei 2026, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan lebih terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga unsur masyarakat, proses pemulihan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan optimal, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh progres pekerjaan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perkembangan pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan setiap hari kerja mulai pukul 10.00 WIB. Laporan tersebut mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari pemulihan infrastruktur, rehabilitasi lahan pertanian, pembangunan fasilitas umum, hingga progres pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.



Dari kiri ke kanan: Brigjen TNI Topri Daeng Balaw dan Gatot Satria Wijaya

Monitoring harian percepatan pemulihan pascabencana tanggal 13 Mei 2026 dipimpin oleh Brigjen TNI Topri Daeng Balaw (Koordinator Hubungan Antar Kementerian & Lembaga) dan Gatot Satria Wijaya (Badan Nasional Penanggulangan Bencana-BNPB). Topri Daeng Balaw, menegaskan bahwa “Monitoring dan pelaporan harian menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran, terukur, dan dapat segera ditindaklanjuti apabila terdapat kendala di lapangan.” Senada dengan hal tersebut, Gatot Satria Wijaya menyampaikan bahwa “Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi agar masyarakat, khususnya para petani, dapat segera kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah.”

Progres Pemulihan Hingga Mei 2026

Memasuki pertengahan Mei 2026, percepatan pemulihan lahan sawah terus dilakukan secara bertahap. Berdasarkan data per 13 Mei 2026 pukul 09.00 WIB, target pemulihan lahan sawah mencapai 42.702 hektare.

Dari target tersebut: (1) Realisasi Detail Rancang Teknis (DRT)/Survei Investigasi dan Desain (SID) telah mencapai 17.382 hektare atau 41 persen; (2) Lahan dalam proses konstruksi mencapai 13.959 hektare atau 33 persen; (3)

Sementara lahan yang telah selesai konstruksi mencapai 5.136 hektare atau 12 persen.

Aceh menjadi provinsi dengan target pemulihan terbesar, yakni 31.464 hektare. Hingga 13 Mei 2026, progres konstruksi di Aceh mencapai 4.949 hektare dengan realisasi penyelesaian konstruksi sebesar 1.100 hektare.

Di Sumatera Utara, target pemulihan mencapai 7.336 hektare. Proses konstruksi tercatat seluas 5.201 hektare, sementara lahan yang telah selesai dipulihkan mencapai 1.005 hektare.

Sementara itu, Sumatera Barat menunjukkan progres pemulihan tercepat secara persentase. Dari target 3.902 hektare, sebanyak 3.032 hektare telah selesai konstruksi atau mencapai sekitar 77,7 persen. Selain itu, tercatat adanya penambahan realisasi konstruksi rehabilitasi sawah seluas 93 hektare.

Laporan tersebut disampaikan oleh Aulia Azhar Abdurahman (Katim Data Sosial Sarana Prasarana) didampingi oleh Suyati (Prakom Utama Data Tanaman Pangan dan Hortikultura) dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) yang mewakili Kementerian Pertanian dalam pelaporan monitoring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.



Update Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam 2026 di Kemendagri yang dihadiri oleh Pusdatin (Aulia Azhar dan Suyati) sebagai perwakilan dari Kementan

Penambahan progres di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pertanian yang terus dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Pemerintah berharap rehabilitasi lahan sawah dapat segera mendukung aktivitas pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah pascabencana.

Dengan sistem koordinasi dan monitoring yang berjalan secara intensif, pemerintah optimistis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat terus menunjukkan progres positif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Menuju Pemulihan yang Berkelanjutan

Ke depan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program rehabilitasi di seluruh wilayah terdampak. Pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga membangun wilayah yang lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi nasional, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemulihan yang cepat, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penulis : Suyati

e-Banper: Bantuan Pertanian Makin Tepat Sasaran

Transformasi digital terus dilakukan di sektor pertanian guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) dan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian adalah implementasi aplikasi e-Banper sebagai sarana pengelolaan bantuan pemerintah secara digital.

Aplikasi e-Banper hadir untuk mendukung proses pengelolaan bantuan pemerintah agar berjalan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Melalui sistem ini, proses pengajuan, verifikasi, monitoring, hingga pelaporan bantuan dapat dilakukan secara digital sehingga mempermudah koordinasi antar unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kehadiran e-Banper juga menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan sistem yang terintegrasi, data penerima bantuan dapat terdokumentasi dengan lebih baik dan memudahkan proses pemantauan serta evaluasi program secara berkelanjutan.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, aplikasi e-Banper membantu memperkuat akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat melalui sistem digital. Hal ini mendukung penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran serta meminimalkan potensi kesalahan data dan keterlambatan pelaporan.

Kolaborasi antara Pusdatin dan Biro Perencanaan juga menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital sektor pertanian. Pengembangan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi.

Ke depan, e-Banper diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan bantuan pemerintah di sektor pertanian serta menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Penulis : Lilik W.

Satu Data Pertanian untuk Indonesia Maju

Data menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang modern dan berkelanjutan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian terus berupaya menghadirkan data pertanian yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat.

Melalui penguatan sistem informasi dan integrasi data antar unit kerja, Pusdatin mendukung implementasi konsep Satu Data Pertanian sebagai upaya mewujudkan pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan, monitoring program, hingga evaluasi pembangunan pertanian nasional.

Di era transformasi digital, kebutuhan akan data yang cepat dan akurat menjadi semakin penting. Oleh karena itu, Pusdatin terus melakukan pengembangan layanan data dan informasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Implementasi Satu Data Pertanian diharapkan mampu meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan data yang terintegrasi, koordinasi pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian.

Selain itu, penguatan tata kelola data juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi layanan data kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Ke depan, Pusdatin akan terus memperkuat inovasi layanan data dan informasi guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri, modern, dan berdaya saing. Dengan dukungan data yang berkualitas, pembangunan pertanian nasional diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Penulis : Lilik W.



Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H

Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian senantiasa tumbuh dalam setiap langkah kita.



satudata.pertanian.go.id